

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Konflik**

##### **1. Definisi Konflik**

Konflik berasal dari bahasa latin: *Conflintus* yang arti pertentangan, perwujudan dan pelaksanaan beraneka pertentangan antara dua pihak yang dapat merumuskan dua orang bahkan golongan besar seperti negara.<sup>19</sup> Pada dasarnya konflik merupakan proses batin yang diliputi kegelisahan karena pertentangan atau dapat dikatakan sebagai interaksi-interaksi pertentangan antara dua pihak atau lebih. Konflik sendiri seringkali diibaratkan sebagai pisau bermata dua, yang mana ia membawa dampak positif apabila mampu memperkokoh masyarakat untuk lebih solid satu dengan yang lain, namun juga membawa dampak negatif apabila konflik bergerak melawan struktur yang ada di masyarakat.

Lewis A. Coser mengemukakan bahwa konflik merupakan proses yang sifatnya instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial pada masyarakat sehingga mampu menetapkan serta menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok.<sup>20</sup> Definisi konflik menurut Coser tersebut mampu memberikan penjelasan bahwa konflik bukan hanya berdampak negatif saja, namun konflik juga mampu mengarahkan kepada hal positif yakni dengan adanya konflik maka struktur akan beradaptasi ataupun melakukan perubahan dengan

---

<sup>19</sup>Wirawan, *Konflik Dan Manajemen Konflik*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), hal. 4

<sup>20</sup>Ibid, hal. 107

tujuan untuk memperkuat dan mempertahankan susunan struktur yang telah disetujui bersama.

## **2. Bentuk-bentuk Konflik**

Menurut Ahmadi (dalam Mustamin, 2016), konflik terbagi menjadi beberapa bentuk yakni sebagai berikut.

- a. Konflik pribadi, yakni pertentangan yang terjadi antara dua individu atau lebih karena berbeda sudut pandang.
- b. Konflik kelompok, yakni pertentangan yang terjadi antar kelompok.
- c. Konflik antar kelas sosial, yakni pertentangan yang terjadi karena kesenjangan maupun ketimpangan yang ada diantara kelas sosial.
- d. Konflik rasial, yakni pertentangan karena adanya perbedaan antara ras satu dengan yang lainnya.
- e. Konflik politik, yakni pertentangan yang terjadi karena perbedaan paham dan aliran politik yang dianut.
- f. Konflik budaya, yakni pertentangan yang terjadi karena adanya perbedaan kebudayaan.<sup>21</sup>
- g. Konflik agama, yakni pertentangan yang terjadi karena perbedaan keyakinan serta aliran agama yang dianut. Konflik agama adalah suatu yang dibenarkan dari adanya perbedaan keberagamaan.<sup>22</sup>

Menurut ajaran agama Islam, konflik merupakan fenomena yang

---

<sup>21</sup>Mustamin, STUDI KONFLIK SOSIAL DI DESA BUGIS DAN PARANGINA KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA TAHUN 2014, Jurnal Imiah Mandala Education, Vol. 2, No. 2, Oktober 2016, hal. 187-188

<sup>22</sup>Djam'annuri, Sejarah Konflik dan Perdamaian Agama-agama, Deskripsi Mata-Kuliah, Yogyakarta:2008, hal. 2

tidak bisa dihindari sebab manusia diciptakan berbeda-beda serta memiliki sifat berkonflik. Meskipun setiap agama mengajarkan perdamaian, kebersamaan sekaligus menebar misi kemaslahatan bagi lingkungan disekitarnya. Akan tetapi dalam tataran sosiologis, wajah agama tidak seideal yang diharapkan dalam kerangka normatif tersebut. Kerap kali raut wajah agama tercoreng dan ternoda dalam kecamuk konflik sosial, budaya, dan politik. Demikian itu sebenarnya bukan kesalahan ajaran agama itu sendiri, namun lebih disebabkan karena *human error*, yakni sikap sebagian para pemeluknya yang kadangkala menafsirkan ajaran teologis-normatif secara serampangan.<sup>23</sup> Adanya penafsiran ajaran agama secara serampangan oleh beberapa oknum bisa saja menimbulkan konflik di lingkungan sosial yang mana berdampak besar kepada masyarakat yang tidak mengetahui permasalahan yang terjadi.

### **3. Faktor Penyebab Konflik**

Konflik semata-mata tidak terjadi secara instan, tentunya karena ada hal-hal yang menjadi faktor kemunculannya. Berikut ini merupakan beberapa faktor pemicu terjadinya konflik secara global.

#### **a. Perbedaan pendirian dan keyakinan pada tiap individu.**

Pada konflik ini masing-masing pihak berusaha menghancurkan lawannya, bukan hanya secara fisik namun dapat melalui pembinasaan ide-ide antar individu tanpa mengingat

---

<sup>23</sup>Thoha Hamim (dkk)., Resolusi Konflik Islam Indonesia, Yogyakarta: LKiS Aksara, 2007, hal. 5

bahwa pada dasarnya tiap individu memiliki sifat dan tujuan yang berbeda-beda.

b. Perbedaan kebudayaan

Perbedaan kebudayaan mampu menjadi faktor pemicu konflik antar individu maupun antar kelompok apabila tiap kelompok memiliki sikap etnosentrisme dan tidak mau menghargai perbedaan yang ada.<sup>24</sup>

c. Perbedaan kepentingan

Kelompok-kelompok yang ada di masyarakat akan bersaing dan berkonflik untuk memperebutkan kesempatan dan sarana dengan maksud mencapai tujuan masing-masing kelompok masyarakat.<sup>25</sup>

Selain faktor penyebab konflik secara global, ada juga faktor penyebab konflik agama yang sangat kompleks dan saling terkait. Menurut Zaenuddin dalam M. Fahim Thabara menjelaskan beberapa penyebab dari terjadinya konflik agama yakni sebagai berikut.

a. Eksklusifisme

Konflik agama dapat terjadi apabila terdapat kesalahan persepsi terhadap agama yang berwujud eksklusifisme atau ketertutupan. Sikap eksklusif ini mendorong suatu pemeluk agamanya menutup terhadap relasi sosial dengan para pemeluk agama lain. Maka dari itu, perlu adanya kesadaran beragama bagi

---

<sup>24</sup>J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 68

<sup>25</sup>Astrid Susanto, *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Bina Cipta, 2006), hal. 70

para pemeluk suatu agama bahwa agama bukan hanya mengajarkan terkait keimanan saja, namun juga cara bersosial sebagai salah satu upaya menjalankan tugas dalam menjaga keseimbangan di lingkungan sosial.

b. Truth Claim

Truth claim atau klaim kebenaran merupakan suatu anggapan bahwa agama yang diyakininya merupakan agama yang paling benar. Anggapan truth claim terhadap agamanya merupakan suatu hal yang wajar, namun apabila anggapan tersebut tidak diimbangi dengan rasa toleransi dan moderasi maka dapat menimbulkan suatu konflik.

c. Fanatisme

Sejatinya memiliki sikap fanatik dalam kehidupan beragama sangat perlu untuk dilakukan oleh para pemeluknya, sebab dengan begitu merepresentasikan bahwa seseorang benar-benar cinta dan memiliki rasa kepemilikan terhadap agamanya. Akan tetapi perlu dipertegas pula, bahwa fanatiknya pun tidak boleh berlebihan agar tidak buta dalam menyikapi agama lain.

d. Politisasi Agama

Politisasi agama merupakan penggunaan agama maupun simbol-simbol agama sebagai alat untuk mencapai tujuan politik ataupun mendapatkan suara dalam memenangkan suatu pemilihan pemimpin. Dalam hal ini politisasi agama mampu menjadi pemicu

terjadinya perpecahan. Alangkah lebih baik apabila menjauhkan ataupun justru menghapuskan agama dari kegiatan yang berbau politik.<sup>26</sup>

#### **4. Fungsi Konflik**

Lewis A. Coser mengemukakan terkait fungsionalisme konflik dengan maksud menyatukan dua pendekatan yang berbeda yakni teori fungsionalisme struktural dan teori konflik. Gagasan yang diungkapkan oleh Lewis A. Coser dikembangkan berdasarkan teori George Simmel yang menganggap bahwa konflik tunduk terhadap suatu perubahan. Pengembangan teori yang dilakukan oleh Coser yakni dengan memberikan gambaran kondisi-kondisi konflik apabila secara positif akan membantu struktur dan apabila negatif justru akan memperlemah struktur masyarakat.<sup>27</sup> Konflik berperan sebagai suatu proses dalam membentuk mekanisme pembentukan serta pertahanan kelompok-kelompok dan batas-batasnya.

Konflik dapat dinilai sebagai sumber kohesi ataupun sumber perpecahan bergantung pada asal mula ketegangan, isu tentang konflik, cara penyelesaiannya serta tipe struktur konflik itu berkembang.<sup>28</sup> Apabila konflik diselesaikan dengan baik, maka konflik akan berfungsi positif yakni sebagai sarana membangun komunikasi dan memelihara solidaritas

---

<sup>26</sup>Fahim Thabara, *Sosiologi Agama: Konsep, Metode Riset, dan Konflik Sosial*, (Malang: Madani, 2016)

<sup>27</sup>Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 105-107

<sup>28</sup>Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 126

dalam masyarakat dengan maksud mencegah ketegangan yang berakibat pada perpecahan. Di sisi lain, konflik dapat berfungsi negatif apabila konflik tersebut mengarah pada perpecahan dan perselisihan yang dampaknya merugikan suatu kelompok secara material dan menelan korban jiwa.<sup>29</sup>

### **B. *Early Warning System***

Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) merupakan serangkaian sistem untuk memberitahukan akan timbulnya kejadian alam, dapat berupa bencana maupun tanda-tanda alam lainnya.<sup>30</sup> Pada penerapannya, sistem peringatan dini atau *early warning system* ini tidak hanya digunakan dalam konteks bencana alam saja, namun juga dapat digunakan dalam konteks konflik, ancaman keamanan dan masih banyak lagi. Pada dasarnya, *early warning system* ini memang dirancang untuk mendeteksi serta memberikan peringatan terkait ancaman ataupun bahaya potensial di masa yang akan datang dengan tujuan yakni memberikan informasi yang cukup awal kepada pihak terkait sehingga mereka mampu mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi dampak negatif dari kondisi tersebut.

Sistem peringatan dini konflik atau *Conflict Early Warning System* (*CEWS*) adalah alat analisis risiko yang memberikan prakiraan kekerasan politik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mencegah atau mengurangi konflik. Sistem ini dapat memberikan manfaat besar bagi para

---

<sup>29</sup>Habib Alwi, Pengantar Studi Konflik Sosial: Sebuah Tinjauan Teoritis, (Nusa Tenggara Barat: IAIN Mataram, 2016), hal. 11-12

<sup>30</sup>[https://www.kebumenkab.go.id/index.php/web/news\\_detail/7/3132](https://www.kebumenkab.go.id/index.php/web/news_detail/7/3132) Diakses pada 16 November 2023

pengambil keputusan dan tim krisis yang berupaya mengurangi penderitaan manusia yang disebabkan oleh konflik.<sup>31</sup> Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi risiko konflik sebelum terjadi atau segera setelah dimulai sehingga langkah-langkah pencegahan dapat diambil untuk mengurangi dampaknya. Sistem Peringatan Dini Konflik Sosial juga ada yang berdimensi keagamaan seperti yang tertulis dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 332 tahun 2023. Regulasi tersebut akan menjadi rujukan dalam memitigasi, mencegah maupun mengatasi berbagai konflik yang nantinya menyesuaikan dengan nilai-nilai yang ada dan berkembang pada masyarakat atau *local wisdom*.<sup>32</sup>

Pada konteks konflik keagamaan, moderasi beragama juga mampu menjadi salah satu *early warning system*, karena dalam hal ini kearifan lokal tidak bertolak belakang dengan agama. Moderasi mengharuskan kita merangkul, mengayomi dan menemani bukan malah memerangi kelompok yang memiliki paham yang berbeda. Terdapat empat indikator yang mampu dijadikan sebagai alat untuk mengenali seberapa rentan serta seberapa kuat seorang individu menanamkan nilai moderasi di dalam dirinya. Empat indikator tersebut adalah 1) komitmen kebangsaan; 2) toleransi; 3) anti kekerasan; dan 4) akomodatif terhadap budaya lokal.<sup>33</sup> Berdasarkan hal tersebut, dengan menerapkan moderasi beragama secara tidak langsung telah

---

31Espin Geelmuyden Rød, et al, "A review and comparison of conflict early warning systems", International Journal of Forecasting, Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University, Sweden

<sup>32</sup><https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/formulasi-deteksi-dini-konflik-untuk-indonesia-yang-majemuk>. Diakses pada 24 Maret 2024

<sup>33</sup>Lukman Hakim Saifuddin, 2019. dalam buku "Moderasi Beragama". Kementerian Agama Republik Indonesia, hal. 43.



berupaya untuk mencegah terjadinya konflik dalam suatu kelompok masyarakat.

Maka dari itu, sistem peringatan dini atau *early warning system* dapat menjadi alat yang sangat berharga untuk seluruh elemen masyarakat dalam melindungi nyawa dan harta benda maupun kerugian-kerugian yang didapatkan dari suatu ancaman.<sup>34</sup> Selain itu, dengan adanya *early warning system* ini mampu memberikan waktu yang cukup bagi individu serta pihak yang terkait untuk mengambil langkah-langkah pencegahan.

**a. Bentuk *Early Warning System***

*Early Warning System* bukan hanya digunakan dalam mitigasi bencana alam saja, akan tetapi juga mampu digunakan dalam hal mitigasi konflik sosial. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui rancangan program manajemen sistem peringatan dini atau *early warning system* konflik sosial berdimensi keagamaan dengan bentuk strateginya yakni sebagai berikut :

1. Landasan Hukum

Pada proses pengimplementasian Keputusan Menteri Agama No. 332/2023 terkait Sistem Peringatan Dini atau *Early Warning System* Konflik Sosial Keagamaan didasarkan pada landasan hukum yang kuat yakni UU No 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial serta Peraturan Pemerintah No. 2/2015 tentang Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial.

---

<sup>34</sup>[https://bpbd.palikab.go.id/web/kontent/28/pedoman\\_peringatan\\_dini](https://bpbd.palikab.go.id/web/kontent/28/pedoman_peringatan_dini) Diakses pada 11 Desember 2023

Landasan hukum inilah yang menjadi pedoman serta kerangka kerja program yang memiliki tujuan mencegah dan menangani konflik sosial keagamaan, sehingga diharapkan programnya mampu berjalan efektif dan sesuai prinsip penanganan konflik yang ditetapkan negara.

## 2. Program dan Layanan Keagamaan

Pada proses perumusan sistem peringatan dini (*early warning system*) konflik keagamaan ini, analisis yang digunakan adalah pendekatan SOAR (*Strengths, Opportunities, Aspirations, Result*) yang berfokus pada potensi positif, kekuatan, peluang, aspirasi dan hasil yang diinginkan dengan harapan angka konflik sosial keagamaan mampu ditekan dan indeks kerukunan umat beragama meningkat. Proyeksi program sistem peringatan dini (*early warning system*) konflik sosial keagamaan ini bertujuan untuk memberikan pijakan bagi pengembangan masyarakat yang lebih sadar nilai-nilai toleransi, dialog dan perdamaian melalui kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama dan masyarakat. Tujuan dari adanya sistem peringatan dini (*early warning system*) konflik sosial berdimensi keagamaan ini adalah mewujudkan Indonesia yang harmonis melalui perbedaan keyakinan yang menjadi jembatan penghubungnya.

Layanan keagamaan serta aktor-aktornya yang berpotensi sebagai subjek pelaksanaan sistem peringatan dini atau *early warning system* konflik sosial keagamaan adalah organisasi masyarakat yang berbasis keagamaan, penyuluh yang berada di Kantor Urusan Agama tiap daerah, serta tokoh agama yang mampu memberikan arahan serta edukasi keagamaan yang benar dengan tujuan menghindari interpretasi yang memicu adanya konflik.<sup>35</sup>

Bentuk strategi tersebut juga termasuk dalam mitigasi konflik yang disampaikan oleh Kemenag RI yang menggunakan "*dramaturgy approach*" yang diharapkan mampu memantau gejala intoleransi dan ketidakharmonisan sosial.<sup>36</sup>

#### **b. Dampak *Early Warning System***

Early Warning System Konflik Sosial yang dilakukan tokoh agama, tentunya membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat beserta lingkungannya. Berikut ini merupakan dampak penerapan *early warning system* konflik:

##### 1. Toleransi beragama

Toleransi beragama berarti menghormati dan membiarkan orang lain beribadah menurut ajaran agamanya serta menaati semua aturan agama yang dianut tanpa ada yang mengganggu atau

---

<sup>35</sup><https://www.kemenag.go.id/opini/langkah-strategis-redam-potensi-konflik-sosial-keagamaan-N4dYs>. Diakses pada 04 Juni 2024

<sup>36</sup><https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/mitigasi-konflik-sosial-keagamaan-kemenag-bentuk-early-warning-system>. Diakses pada 04 Juni 2024

memaksakan.<sup>37</sup> Setelah adanya *early warning system* dari konflik yang telah diterapkan tokoh agama pada lingkungannya, tentunya masyarakat akan semakin paham terkait toleransi beragama dan bagaimana hal yang perlu dilakukan dalam proses menjaga kerukunan antarumat beragama.

## 2. Kohesi sosial

Kohesi sosial didasarkan pada kemampuan untuk bekerjasama dalam kelompok, dimana hal tersebut didasari pada persamaan nilai, tantangan, dan kesempatan yang setara berdasarkan harapan dan kepercayaan. Terkadang setelah adanya konflik masyarakat akan lebih membangun solidaritas dan kerjasama di lingkungannya demi menjaga keutuhan lingkungan.

## 3. Partisipasi masyarakat dalam pencegahan konflik

*Early warning system* meningkatkan partisipasi masyarakat secara signifikan dan positif dengan mengidentifikasi dan menangani kemungkinan konflik agama. EWS mendorong warga untuk berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan harmoni dengan meningkatkan kesadaran, memobilisasi tindakan kolektif, memberdayakan masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, dan mengembangkan kapasitas komunitas. Partisipasi masyarakat yang meningkat ini tidak hanya meningkatkan keamanan dan stabilitas tetapi juga menanamkan rasa kepemilikan

---

<sup>37</sup>Daud Ali dkk, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hal. 80

dan tanggung jawab bersama, yang merupakan dasar bagi kohesi sosial yang kuat dan abadi.<sup>38</sup>

### C. Interaksionisme Simbolik

Terdapat dua kelompok awal yang mendukung interaksionisme simbolik, pertama berasal dari Madzab Chicago dengan tokohnya Charles Horton Cooley dan Herbert Blumer. Kedua, Madzab Lowa yang dipengaruhi secara signifikan oleh karya Robert Ezra Park dan William I Thomas. Dua madzab tersebut memiliki sifat yang berbeda. Madzab Lowa menggunakan pendekatan sosiologi mikro, sedangkan Madzab Chicago menggunakan pendekatan psikologi sosial.<sup>39</sup>

Herbert Blumer adalah murid dari George Herbert Mead. Herbert Blumer menyatakan bahwa tindakan manusia tidak hanya mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, tetapi manusia juga memiliki kemampuan untuk memberi arti, menilai, dan memutuskan untuk bertindak berdasarkan referensi di sekitarnya yang disebut dengan proses *self indication*.<sup>40</sup> Pandangan Blumer tersebut dipengaruhi oleh John Dewey, yang didasarkan pada fakta fenomenologis.

---

<sup>38</sup>Erna Rochana, dkk, Pentingnya sistem peringatan dini konflik sosial dengan menggunakan WhatsApp, *Jurnal Internasional Penelitian Inovatif dan Studi Ilmiah*, 7(1) 2024

<sup>39</sup>Umiarso dan Elbadiansyah, *Interaksionisme Simbolik Dari Era Klasik Hingga Modern* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 175.

<sup>40</sup>Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 261

Menurut pandangan interaksionisme simbolik, tindakan manusia ditentukan oleh makna yang ada pada dirinya sendiri.<sup>41</sup> Makna tersebut berasal dari proses penafsiran individu terhadap berbagai obyek yang ada di luar dirinya pada saat sedang interaksi. Jadi, makna tersebut bersifat dinamis yang setiap saat ada peluang untuk berubah dan mengikuti alur keterkaitan antara diri (*self*), pikiran (*mind*), dan realitas sosial. Makna-makna dibentuk oleh akal budi manusia sendiri.

Herbert Blumer mengemukakan interaksionisme simbolik sebagai suatu perspektif yang bertumpu pada tiga premis, yaitu:

- a. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu bagi diri mereka.
- b. Makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain.
- c. Makna-makna tersebut disempurnakan ketika proses sosial sedang berlangsung.<sup>42</sup>

Interaksionisme simbolik menurut Blumer mengandung pokok pandangan yang mengerucutkan pada proses penafsiran untuk pembentukan makna. Pemikiran Blumer memiliki ide-ide dasar yang dapat diringkas sebagai berikut, yaitu:

- 1) Masyarakat terdiri dari manusia yang berinteraksi.

---

<sup>41</sup> Ibid, 157.

<sup>42</sup> Margaret M. Poloma, Sosiologi Kontemporer, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 258

- 2) Interaksi terdiri dari berbagai kegiatan manusia yang berhubungan dengan kegiatan manusia lain, baik secara interaksi simbolik maupun non simbolik.
- 3) Objek-objek tidak mempunyai makna yang intrinsik, makna merupakan produk dari interaksi simbolik.
- 4) Manusia tidak hanya mengenal objek eksternal, mereka juga melihat dirinya sebagai objek.
- 5) Tindakan manusia adalah tindakan interpretatif yang dibuat oleh manusia.
- 6) Tindakan tersebut saling dikaitkan dan disesuaikan oleh anggota-anggota kelompok.<sup>43</sup>

Penjelasan konsep interaksionisme simbolik Blumer merujuk pada interaksi antar individu yang khas dari tindakan antar manusia. Kekhasan bahwa manusia saling menafsirkan, mengartikan tindakannya. Tindakan bersama yang berulang-ulang dan stabil melahirkan suatu “kebudayaan” dan “aturan sosial”.

Interaksionisme simbolik dilakukan dengan menggunakan bahasa, sebagai satu-satunya simbol yang terpenting dan melalui isyarat.<sup>44</sup> Simbol bukanlah suatu fakta-fakta yang sudah jadi, melainkan berada dalam proses yang terus-menerus dalam proses “menjadi”. Pemaknaan dari bahasa banyak

---

<sup>43</sup>Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 264-265.

<sup>44</sup>Umiarso dan Elbadiansyah, *Interaksionisme Simbolik Dari Era Klasik Hingga Modern* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 168.

ditentukan oleh konstruk sosial dari masing-masing diri (*self*) aktor, interpretasi individu memiliki peran yang sangat penting dalam modifikasi simbol yang akan ditangkap dalam proses berfikir masing-masing diri aktor. Fokus dari pandangan ini adalah simbol dan interaksi. Simbol mengacu pada setiap objek sosial. Simbol merupakan ciptaan unik dari manusia.<sup>45</sup>

Berdasarkan pemaparan teori diatas, peneliti merasa bahwa teori yang dikemukakan oleh Herbert Blumer mampu dijadikan sebagai pisau analisis dalam menggali dan mengolah data sesuai dengan fenomena yang ada, sebab dengan memahami serta memanfaatkan teori interaksionisme simbolik ini, peneliti dapat mencari tahu lebih dalam proses penerapan dari bentuk *early warning system* tokoh agama dalam upaya pencegahan konflik demi menjaga kerukunan antarumat beragama di Dusun Gunung Buthak Desa Bulusari Kecamatan Tarokan.

## **D. Tokoh Agama**

### **1. Definisi Tokoh Agama**

Pengertian tokoh dalam kamus bahasa Indonesia berarti “orang-orang yang terkemuka”<sup>46</sup>. Tokoh agama merupakan gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang yang memiliki kelebihan di bidang keagamaan. Kelebihan yang dimaksud dalam hal ini adalah karisma, wibawa dan ilmu pengetahuan keagamaan dari seorang tokoh agama, sehingga beliau dapat dijadikan sebagai panutan spiritual serta pemimpin

---

<sup>45</sup> Ibid, 169.

<sup>46</sup>Yowono, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Arkolis, 1999), hal. 83



di masyarakat. Selain itu, tokoh agama juga seringkali dijuluki sebagai pemimpin nonformal dalam artian sekalipun seorang tokoh agama tidak memimpin suatu organisasi tertentu, namun kehadirannya sangat dibutuhkan dan diakui oleh masyarakat.

Tokoh agama menjadi panutan dalam masyarakat yang dituntut untuk dapat berkomunikasi secara terbuka dengan tokoh agama yang lain agar proses komunikasi tersebut dapat lebih efektif dengan adanya tatap muka secara pemahaman dan cepat didapatkan.<sup>47</sup> Terbentuknya komunikasi yang baik antar tokoh agama, diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang toleransi antarumat beragamanya tinggi. Adanya hal tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan seorang tokoh agama sangat berpengaruh dalam proses perubahan sosial maupun keagamaan pada masyarakat sesuai ajaran agama yang dijelaskan dalam kitab suci.

#### **a. Tugas Tokoh Agama**

Tokoh agama tentunya memiliki tugas yang mulia dalam kehidupan sosial di lingkungan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, tugas dari seorang tokoh agama yakni sebagai berikut.

- 1) Memberikan kerangka pokok yang dapat digunakan oleh para pemeluk agamanya sebagai pegangan hidup. Selain itu, kerangka pokok tersebut mampu digunakan oleh tokoh agama sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan

---

<sup>47</sup>Noval Setiawan Sarbini, Toleransi dan Kerukunan Antarumat Beragama (Pola Komunikasi Tokoh Agama Desa Anggrasmanis, Jenawi, Karanganyar (Jurnal Academic Journal Of Da'wa and Communication, Vol. 01, No. 01, 2020), hal. 62

ketika menghadapi serta menyelesaikan suatu permasalahan.

- 2) Melakukan pengawasan, pengendalian serta menyalurkan perilaku masyarakat yang dipimpinnya.
- 3) Menjadi perwakilan kelompok apabila berada di luar kelompok yang dipimpinnya.<sup>48</sup>

#### **b. Fungsi Tokoh Agama**

Bukan hanya tugas saja, tentunya tokoh agama pun memiliki fungsi di lingkungan sosial masyarakat, yang mana seorang tokoh agama dianggap sebagai sarana dalam proses penguatan keimanan para penganut agamanya. Berikut ini merupakan fungsi dari seorang tokoh agama.

##### 1) Fungsi Pemeliharaan Ajaran Agama

Pada fungsi pemeliharaan ini, tokoh agama memiliki hak serta wewenang untuk menjadi pemimpin dalam upacara-upacara keagamaan. Tokoh agama mengajarkan ritual keagamaan dengan benar serta berperilaku sesuai dengan ajaran agamanya. Selain itu, tokoh agama pun berhak mengoreksi apabila terjadi kesalahan ataupun penyimpangan dalam prosesi ritual keagamaan.

##### 2) Fungsi Pengembangan Ajaran Agama

---

<sup>48</sup>Soerjano Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 256

Pada fungsi ini, tokoh agama berupaya untuk menyebarluaskan ajaran agama sebagai proses peningkatan kualitas serta kuantitas para pemeluknya.<sup>49</sup> Apabila kualitas serta kuantitas dalam masyarakat mengalami peningkatan, maka diharapkan akan tercipta lingkungan yang stabil dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tokoh agama sangat berperan penting dalam lingkungan sosial masyarakat, mulai dari memberikan pendidikan dan pengajaran kepada umatnya terkait ilmu keagamaan, menjadi pemimpin dalam upacara maupun ritual keagamaan hingga menjaga dan meneruskan tradisi agama serta menjaga kesinambungan warisan agama bagi generasi mendatang. Di lain sisi, tokoh agama pun berperan apabila terjadi konflik di tengah masyarakat, yang mana pada kondisi tersebut tokoh agama akan menjadi penengah dan menyarankan penyelesaian konflik secara damai sesuai dengan ajaran agama yang tertera dalam kitab suci. Maka dari itu, adanya tokoh agama menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan suatu konflik melalui jalan damai.

---

<sup>49</sup>Ronald, Tokoh Agama Dalam Masyarakat, edisi Kedua, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 28